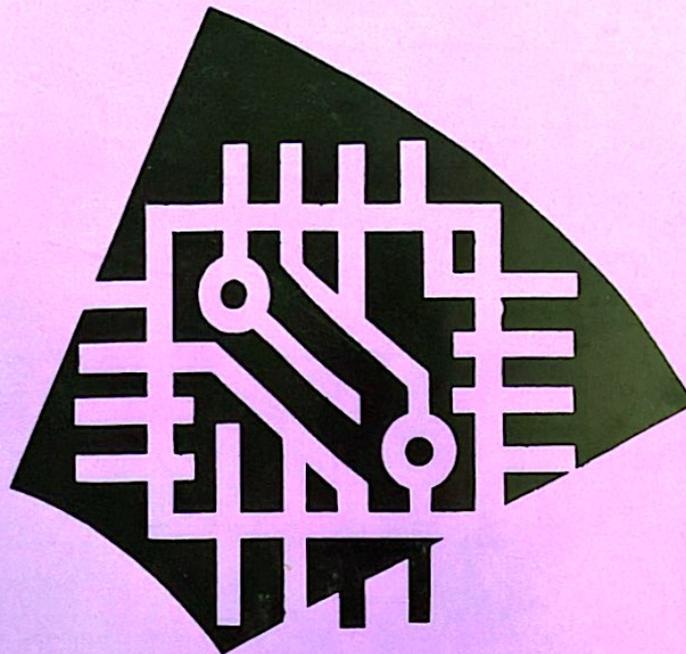


S. 2008-3



**ANALISIS SITUASI
PEMBANGUNAN MANUSIA
KABUPATEN BATANG
TAHUN 2008**



**Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Batang
Bekerjasama Dengan
Badan Pusat Statistik Kabupaten Batang**

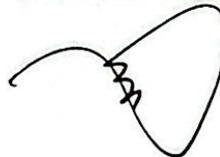
KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT, kami dapat menyelesaikan buku "Analisis Situasi Pembangunan Manusia Kabupaten Batang Tahun 2008". Analisis Situasi Pembangunan Manusia merupakan tahapan dalam siklus perencanaan (planning cycle) yang lazim dilakukan setelah visi atau sasaran jangka panjang yang ditetapkan dengan tujuan mampu menyajikan kinerja pembangunan manusia di Kabupaten Batang.

Analisis situasi yang cermat dan menyeluruh akan mempermudah kegiatan perencanaan berikutnya yaitu menetapkan sasaran-sasaran jangka menengah atau jangka pendek dan mengidentifikasi kebijakan/strategi untuk mencapai sasaran-sasaran yang ditetapkan. Dalam kerangka perencanaan pembangunan, analisis situasi harus dilakukan menyeluruh dalam arti mencakup semua aspek yang dianggap relevan namun demikian suatu analisis dapat dianggap memadai jika sudah mencakup kegiatan yang mengidentifikasi isu-isu pembangunan manusia serta latar belakang atau faktor-faktor yang mempengaruhinya.

Tersusunnya buku ini adalah berkat kerja sama yang baik antara Dinas/Instansi/Lembaga yang ada di Kabupaten Batang. Harapan kami dengan tersusunnya buku ini dinas-dinas terkait dapat menyusun program dalam upaya meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia dengan prioritas "Peningkatan Layak Hidup Masyarakat". Akhirnya semoga buku Analisis Situasi Pembangunan Manusia Kabupaten Batang Tahun 2008 dapat bermanfaat dan dimanfaatkan. Terima kasih.

Batang, Juli 2009
KEPALA BAPPEDA KAB. BATANG,



SUSILO, S.H., M.M.
Pembina Utama Muda
NIP.19530603 197602 1 004

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iv
Daftar Gambar	vi
BAB I Pendahuluan	1
1.1. Gambaran Umum	1
1.2. Metodologi	3
BAB II DEMOGRAFI DAN KEPENDUDUKAN	14
2.1. Kondisi Pembangunan Manusia	14
2.2. Angka Komponen IPM Kabupaten Batang	15
BAB III Bidang Kesehatan	22
3.1. Keluhan Kesehatan	23
3.2. Penolong Kelahiran Pertama	23
3.3. Keluarga Berencana	25
3.4. Perumahan	27
3.5. Fasilitas Kesehatan	33

BAB IV Bidang Pendidikan	35
4.1. Tingkat Partisipasi Sekolah	35
4.2. Kemampuan Membaca dan Menulis	37
4.3. Pendidikan yang Ditamatkan	39
4.4. Fasilitas Pendidikan	40
BAB V Angkatan Kerja	41
BAB VI Penutup	46
6.1. Kesimpulan	46
6.2. Saran	47

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Komposisi Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur Tahun 2008	2
Tabel 1.2 Indikator Fertilitas dan Mortalitas Kabupaten Batang Tahun 2006-2008....	2
Tabel 1.3 Nilai Ekstrem Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang Digunakan dalam Perhitungan	9
Tabel 1.4 Jenjang Pendidikan dan Skor yang Digunakan Untuk Menghitung Rata-rata Lama Sekolah (MYS)	11
Tabel 2.1 Indikator Potensi Sosial Ekonomi Kabupaten Batang Tahun 2004-2008	15
Tabel 2.2. Persentase Rumah tangga Kabupaten Batang Menurut Golongan Pengeluaran Per Kapita Sebulan Tahun 2007 dan 2008	17
Tabel 2.3. Komponen Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Tahun 2008	21
Tabel 3.1. Persentase Penderita Keluhan Kesehatan di Kabupaten Batang tahun 2007-2008	23
Tabel 3.2. Persentase Penggunaan Alat/Cara KB di Kabupaten Batang Tahun 2007-2008.....	25
Tabel 3.3 Persentase Wanita Pernah Kawin Berumur 10 Tahun Keatas Menurut Umur Perkawinan Pertama Tahun 2008	26
Tabel 3.4. Persentase Jenis Lantai yang Digunakan Rumah tangga di Kabupaten Batang Tahun 2008.....	28
Tabel 3.5. Persentase Status Bangunan Tempat Tinggal yang Ditempati Rumah tangga di Kabupaten Batang Tahun 2008.....	29
Tabel 3.6. Persentase Sumber Air Bersih/Air Minum Rumah tangga di Kabupaten Batang Tahun 2008	30
Tabel 3.7. Persentase Rumah tangga Menurut Sumber Penerangan Yang Digunakan di Kabupaten Batang tahun 2008	31

Tabel 3.8. Persentase Rumahtangga Menurut Penggunaan Fasilitas Buang Air Besar di Kabupaten Batang Tahun 2008	32
Tabel 3.9. Persentase Rumahtangga Menurut Jarak ke Tempat Penampungan Kotoran/Tinja di Kabupaten Batang Tahun 2008	33
Tabel 3.10. Fasilitas Kesehatan di Kabupaten Batang Tahun 2007-2008	34
Tabel 4.1. Persentase Penduduk Umur 7-12 Tahun Menurut Partisipasi Sekolah Tahun 2007-2008	35
Tabel 4.2. Persentase Penduduk Umur 13-15 Tahun Menurut Partisipasi Sekolah Tahun 2007-2008	36
Tabel 4.3. Persentase Penduduk Umur 10 Tahun Ke Atas Yang Tidak Bisa Membaca dan Menulis Tahun 2007-2008	38
Tabel 4.4. Persentase Penduduk Umur 10 Tahun Ke Atas Menurut Kemampuan Membaca dan Menulis Tahun 2007-2008	38
Tabel 4.5. Persentase Penduduk Umur 10 Tahun Ke Atas Menurut Pendidikan Yang Ditamatkan Tahun 2007-2008	39
Tabel 4.6. Fasilitas Pendidikan Dirinci Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2008	40
Tabel 5.1. Persentase Angkatan Kerja Tahun 2007-2008	41
Tabel 5.2. Persentase Penduduk yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha Tahun 2008.....	42
Tabel 5.3. Persentase Penduduk yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan Tahun 2007-2008	43
Tabel 5.4. Persentase Penduduk yang Bekerja Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan Tahun 2007-2008	44
Tabel 5.5. Persentase Penduduk yang Bekerja Menurut Jam Kerja Seminggu Seluruhnya Tahun 2008	44

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Grafik 1.	Persentase Rumahtangga Kabupaten Batang Menurut Golongan Pengeiuran per Rumahtangga Sebulan (000) Tahun 2008	17
Grafik 2.	Persentase Penolong Kelahiran Pertama Tahun 2008	24
Grafik 3.	Persentase Penduduk Umur 13-15 Tahun Menurut Partisipasi Sekolah Tahun 2007-2008	37
Grafik 4.	Persentase Penduduk yang Bekerja Menurut Jam Kerja Seluruhnya Tahun 2008	45

Jumlah penduduk Kabupaten Batang tahun 2008 sebesar 293.913 jiwa dengan kepadatan 870 jiwa/km² dan laju pertumbuhan sebesar 0,70%.

Dari hasil penghitungan penduduk tahun 2008 penduduk Kabupaten Batang sebesar 293.913 jiwa dengan laju pertumbuhan sebesar 0,70%.

sebesar 151.235 jiwa dan penduduk perkapita sebesar 10.749 jiwa per kapita (0,23). Kabupaten perantara Kabupaten Batang tahun 2008 sebesar 293.913 jiwa per km². Perantara, sebagian penduduk kecamatan. Batang Kecamatan di bagian Kabupaten Batang, Wanasari, Kemuning, Wanasari, Sekeloa dan Ploah. Sedangkan jumlah penduduk yang lebih kecil tersebar di Kecamatan Perumahan Wanasari, Kemuning, Tala, Kemuning dan Ploah.

Pertumbuhan penduduk Kabupaten Batang tahun 2007 yang sebesar 0,70% merupakan penduduk akhir tahun 2008 yaitu sebesar 0,70%. Sedangkan struktur

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Gambaran Umum

Kabupaten Batang mempunyai luas wilayah 788,64 km² (2,42% dari luas Jawa Tengah) merupakan salah satu daerah agraris di Propinsi Jawa Tengah. Dan juga merupakan salah satu daerah pantura yang cukup strategis. Jarak ibukota kabupaten (Batang) ke ibukota propinsi (Semarang) sejauh 93 km. Kabupaten Batang terdiri atas 15 kecamatan dan 248 desa/kelurahan. Kabupaten Batang terletak diantara 006°51'46" dan 007°11'47" garis Lintang Selatan serta 109°40'19" dan 110°03'06" garis Bujur Timur. Batas-batas wilayah Kabupaten Batang sebagai berikut :

- Sebelah Barat : Kota Pekalongan dan Kabupaten Pekalongan
- Sebelah Selatan : Kabupaten Wonosobo dan Kabupaten Banjarnegara
- Sebelah Timur : Kabupaten Kendal
- Sebelah Utara : Laut Jawa

Jumlah penduduk Kabupaten Batang tahun 2008 sebesar 703.984 jiwa dengan kepadatan 893 jiwa/km² dan laju pertumbuhan sebesar 0,70 %.

Dari hasil registrasi penduduk tahun 2008 jumlah penduduk Kabupaten Batang sebesar 703.984 jiwa. Dengan jumlah penduduk laki-laki

sebesar 351.235 jiwa dan penduduk perempuan sebesar 352.749 jiwa (sex ratio 99,57). Kepadatan penduduk Kabupaten Batang tahun 2008 sebesar 893 jiwa per km². Penduduk terbanyak berada di Kecamatan Batang. Kemudian disusul Bandar, Gringsing, Bawang, Warungasem, Kandeman, Warungasem, Subah dan Blado Sedangkan jumlah penduduk yang lebih kecil tersebar di Kecamatan Pecalungan, Wonotunggal, Banyuputih, Tulis, Tersono, dan Reban.

Pertumbuhan penduduk Kabupaten Batang tahun 2008 menurut hasil registrasi penduduk akhir tahun 2008 yaitu sebesar 0,70 %. Sedangkan struktur

umur penduduk masih terbanyak pada kelompok usia dewasa yaitu 64,56 %, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 1.1 berikut:

**Tabel 1.1. Komposisi Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur
Tahun 2008**

Kelompok Umur	Jumlah
(1)	(2)
1. < 15	217.549
2. 15 – 64	454.470
3. 65+	31.965

Sumber: BPS Kabupaten Batang

Pada tahun 2008 di Kabupaten Batang terjadi penurunan angka kelahiran kasar (CBR) dan angka kematian kasar (CDR). Perkembangan fertilitas dan mortalitas penduduk Kabupaten Batang dapat dilihat dari tabel berikut:

**Tabel 1.2. Indikator Fertilitas dan Mortalitas Kabupaten Batang
Tahun 2006-2008**

Indikator	2006	2007	2008
(1)	(2)	(3)	(4)
1. CBR	5,32	11,90	4,93
2. CDR	2,12	4,69	2,23

Sumber: BPS Kabupaten Batang

Stabilitas politik sepanjang tahun 2008 cukup mantap, sehingga di bidang ekonomi semua sektor mengalami pertumbuhan positif, dengan pertumbuhan ekonomi mengalami sedikit peningkatan sebesar 0,18 % yaitu 3,49 % tahun 2007 menjadi 3,67 % tahun 2008. Pertumbuhan terendah terjadi pada sektor industri

pengolahan yaitu 2,07 %, kemudian diikuti sektor pertambangan dan penggalian 2,24 %, sektor pengangkutan dan sektor perdagangan, restoran dan hotel 2,68 %, komunikasi sebesar 2,88 %, sektor listrik, gas dan air minum 3,97 %, sektor pertanian 4,56 %, sektor konstruksi 4,72 %, sektor jasa perusahaan 5,57 %, dan keuangan, persewaan dan jasa perusahaan 5,95 %.

1.2. Metodologi

1.2.1. Arti dan Ruang Lingkup Pembangunan Manusia

Pembangunan manusia atau yang biasa disebut human development yang dirumuskan oleh The United Nation Development Programme (UNDP) adalah sebagai *perluasan pilihan bagi penduduk*. Perluasan pilihan merupakan proses upaya untuk mencapai taraf yang ingin dicapai. Pada proses tersebut, pembangunan kemampuan manusia melalui perbaikan taraf kesehatan, pengetahuan dan ketrampilan sekaligus sebagai pemanfaatan kemampuan/ketrampilan yang didapatnya.

IPM digunakan untuk mengukur keberhasilan (kinerja) pembangunan manusia.

Konsep pembangunan yang dikembangkan oleh badan dunia tersebut tentunya jauh lebih luas dibandingkan dengan konsep pembangunan ekonomi yang hanya menekankan pada pertumbuhan ekonomi, kebutuhan dasar (pangan, sandang dan perumahan) dan kesejahteraan manusia. Sedangkan konsep yang dikembangkan UNDP mengandung empat (4) unsur yaitu **produktifitas** (*productivity*), **pemerataan** (*equity*), **kesinambungan** (*sustainability*) dan **pemberdayaan** (*empowerment*).

Pembangunan manusia jika dilihat dari sisi pelaku dan sasaran merupakan model pembangunan tentang penduduk, untuk penduduk dan oleh penduduk. Secara rinci dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. *tentang penduduk*; berupa investasi di bidang pendidikan, kesehatan dan pelayanan sosial lainnya.
- b. *untuk penduduk*; berupa penciptaan peluang kerja melalui perluasan (pertumbuhan) ekonomi dalam negeri.

c. *oleh penduduk*; berupa upaya pemberdayaan penduduk dalam menentukan harkat manusia dengan cara berpartisipasi dalam proses politik dan pembangunan.

Prinsip pembangunan manusia seperti yang telah disebutkan di atas sebenarnya telah sesuai dengan hakikat dan strategi pembangunan nasional juga sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD). Karena perencanaan pembangunan daerah merupakan bagian terintegrasi dengan pembangunan nasional.

Indeks pembangunan manusia digunakan oleh UNDP sejak tahun 1990 guna mengukur keberhasilan atau kinerja (performance) suatu negara dalam bidang pembangunan manusia. Dalam studi ini indeks pembangunan manusia digunakan untuk mengukur keberhasilan (kinerja) pembangunan manusia pada tingkat kabupaten di Jawa Tengah khususnya untuk Kabupaten Batang. Studi ini baru memberikan gambaran angka sementara karena yang diperlukan belum dapat terpenuhi/tersedia.

1.2.2. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Penjelasan pada butir 1.1 di atas memberikan gambaran bahwa konsep pembangunan manusia memiliki dimensi yang sangat luas. Perluasan pilihan menurut UNDP hanya mungkin dapat terealisasi jika penduduk memiliki : peluang umur panjang dan sehat, pengetahuan dan ketrampilan yang memadai, dan peluang untuk merealisasikan pengetahuan yang dimiliki dalam kegiatan produktif untuk memperoleh uang sehingga memiliki daya beli. Konsep pembangunan manusia seperti yang tersebut di atas paling tidak akan memberikan gambaran tingkat keberhasilan pembangunan manusia untuk suatu kabupaten/propinsi/negara.

Berdasarkan pedoman yang dikeluarkan UNDP untuk menyusun indeks komposit pembangunan manusia (IPM), indikator yang diperlukan adalah :

a. Angka harapan hidup (*life expectation at age 0/e₀*).

- b. Angka melek huruf penduduk dewasa (*adult literacy rate/lit*) dan rata-rata lama sekolah (*mean years of schooling/mys*).
- c. Paritas daya beli (*Purchasing Power Parity/PPP*) merupakan ukuran pendapatan yang sudah disesuaikan dengan paritas daya beli.

Indikator pertama mengukur "umur panjang dan layak hidup (*decent living*) sehat", angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah untuk mengukur "pengetahuan (*knowledge*) dan ketrampilan (*skill*)". Sedangkan indikator terakhir yaitu "*Paritas daya beli*" untuk mengukur kemampuan dalam mengakses sumber daya beli ekonomi dalam arti luas. Ketiga indikator tersebut yang digunakan sebagai komponen dalam penyusunan Human Development Index (HDI) yang dalam publikasi ini diterjemahkan menjadi IPM.

1.2.3. Fungsi dan Keterbatasan

Pada dasarnya HDI atau IPM adalah suatu indeks komposit yang diharapkan mampu mencerminkan kinerja pembangunan manusia sehingga dapat dibandingkan antar wilayah atau bahkan antar waktu. Fungsi utama sebagai alat banding ini sejalan dengan fungsi Indeks Mutu Hidup (IMH). IMH disusun dari tiga komponen : (1) angka kematian bayi (*Infant Mortality Rate/IMR*), (2) angka harapan hidup umur satu tahun (e_1), dan (3) angka melek huruf (*Lit*). Salah satu kritik mendasar terhadap IMH adalah bahwa dua komponen pertamanya kurang lebih mengukur hal yang sama, seperti dibuktikan oleh kuatnya korelasi antar keduanya, sehingga cukup diwakili oleh salah satu saja. Kelemahan inilah yang antara lain melatarbelakangi dikembangkannya IPM.

IPM nampaknya meneruskan tradisi mengemban nama yang cukup "bombastis" seperti halnya IMH, yaitu mencoba menggambarkan suatu pembangunan manusia atau mutu hidup dalam suatu indeks. Adalah suatu kemustahilan bahwa pembangunan manusia dalam arti luas dapat diukur hanya dengan satu indeks komposit, tak peduli seberapa banyak komponen indikatornya (apalagi jika diingat bahwa semakin banyak variabel yang dimasukkan ke dalam indeks komposit tersebut semakin tinggi pula kemungkinan besarnya

kesalahan). Hal sama juga berlaku bagi IMH, karena mutu hidup sendiri juga mempunyai dimensi yang sangat luas.

Disamping itu, IPM juga masih mempunyai kelemahan seperti yang terkandung pada IMH yaitu dari segi data dan arti. Dari segi data kelemahannya terletak pada kenyataan bahwa konsep/definisi dan kualitas data yang digunakan antar negara sangat beragam sehingga mengurangi kekuatan IPM sebagai alat banding internasional. Kelemahan lain yang bersifat umum dari suatu indeks komposit adalah tidak memiliki arti tersendiri secara individual. Akhirnya, kelemahan lain yang juga melekat dalam suatu indeks komposit seperti IPM adalah ketidakmampuannya dalam memberikan saran kebijaksanaan (policy implication) yang jelas, dan ini memang bukan tujuan pembentukan indeks tersebut.

Dibalik kelemahannya, fungsi IPM sebagai sarana untuk menarik perhatian masyarakat terhadap masalah pembangunan manusia diakui secara luas.

1.2.4. Tujuan dan Cakupan Studi

Studi ini diharapkan mampu menyajikan kinerja pembangunan manusia di wilayah Kabupaten Batang sesuai dengan perspektif UNDP, sebagai pembanding adalah kabupaten-kabupaten di sekitarnya. Hal ini dimungkinkan dengan dipilihnya nilai maksimum dan minimum yang tetap, termasuk pula tingkat daya beli yang sudah dikonstankan.

Secara umum, metodologi yang digunakan dalam studi ini mengikuti metodologi yang telah diterapkan UNDP dalam menyusun HDI 1994. Dalam beberapa hal, dilakukan "penyempurnaan" terutama dalam penyusunan indeks daya beli antar kabupaten/kota (PPP).

1.2.5. Rumus Umum IPM

Komponen IPM terdiri dari angka harapan hidup (e_0) yang menggambarkan tingkat kesehatan yang diperlihatkan dengan rata-rata panjang umur. Selanjutnya komponen pendidikan yang diperoleh dari komponen angka melek huruf (Lit) dan rata-rata lama sekolah (MYS) dengan perbandingan 2:1. Dan terakhir komponen daya beli atau *Purchasing Power Parity* (PPP). Sebelum dilakukan penghitungan IPM yaitu menghitung dengan menggabungkan nilai ketiga komponen tersebut, terlebih dahulu dari masing-masing komponen dihitung indeksinya yang nilainya antara 0 dan 1 atau 0 dan 100 (dengan mengalikan 100). Nilai 0 menggambarkan keadaan yang terburuk sedang nilai 1 atau 100 (jika dikalikan 100) menggambarkan keadaan yang terbaik. Dalam laporan ini indeks dinyatakan dalam ratusan (dikalikan 100) untuk mempermudah penafsiran. Penyusunan indeks tersebut pada dasarnya adalah mengikuti rumus sebagai berikut :

$$I_{(i)} = \frac{[X_{(i)} - \text{Min}.X_{(i)}]}{[\text{Max}.X_{(i)} - \text{Min}.X_{(i)}]}$$

$$IPM = \frac{1}{3} \sum_{i=1}^3 I_{(i)}$$

$$i = 1, 2, 3$$

dimana : $I_{(i)}$ = Indeks komponen IPM ke-i;

$X_{(i)}$ = Nilai komponen IPM ke-i;

Max. $X_{(i)}$ = Nilai komponen IPM ke-i yang tertinggi;

Min. $X_{(i)}$ = Nilai komponen IPM ke-i yang terendah;

IPM = Indeks Pembangunan Manusia kabupaten;

Dalam penghitungan IPM ini, nilai ekstrim menggunakan nilai yang ditetapkan oleh UNDP (1994), sehingga indeks masing-masing komponen dapat dibandingkan dengan daerah lain (untuk komponen e_0 , Lit dan MYS).

Dengan penetapan nilai ekstrim yang digunakan memberikan keuntungan bahwa angka IPM yang dihasilkan :

1. Dapat dibandingkan antar waktu (karena angka ideal tidak akan dapat tercapai oleh IPM suatu daerah dalam waktu dekat).
2. Dapat diletakkan pada skala nasional bahkan internasional karena 3 dari 4 komponen yang digunakan berlaku secara internasional.

1.2.6. Angka Harapan Hidup (e_0)

Variabel/komponen e_0 mencerminkan "panjang umur" sekaligus "kesehatan" suatu kelompok masyarakat. Sebenarnya untuk komponen kesehatan

Angka harapan hidup (e_0) mencerminkan "panjang umur" sekaligus "kesehatan" suatu kelompok masyarakat.

akan lebih tepat apabila digunakan "morbiditas", tetapi karena "angka morbiditas" sulit untuk mendapatkannya maka sementara ini belum dapat dipasang dalam studi penghitungan IPM.

Estimasi penghitungan angka e_0 dari sensus atau survei sebenarnya memberikan gambaran keadaan 3 sampai dengan 4 tahun sebelum pencacahan. Sebagai contoh, besarnya e_0 Jawa Tengah berdasarkan hasil Sensus Penduduk 1990 sebesar 60,3 dan pada tahun 1993 sebesar 63,8 (hasil Survei Penduduk Antar Sensus 1995). Sedangkan, untuk menghitung besarnya e_0 dari setiap kabupaten/kota dapat menggunakan hasil Sensus, Susenas atau Supas. Jika dibandingkan dari ke tiga hasil pengumpulan data tersebut besarnya e_0 ada yang berbeda tetapi beberapa kabupaten menunjukkan angka yang konsisten.

**Tabel 1.3. Nilai Ekstrim Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
yang Digunakan dalam Penghitungan**

Komponen IPM	Nilai Minimum	Nilai Maximum
(1)	(2)	(3)
1. Angka harapan hidup (e_0)	25,0	85,0
2. Angka melek huruf (Lit)	0	100
3. Rata-rata lama sekolah (MYS)	0	15
4. Purchasing Power Parity (PPP)	140,0	1994,0

Sumber: BPS Propinsi Jawa Tengah

Catatan : Nilai minimum dan maximum sesuai ketentuan UNDP (1994 : 108)
Dikutip dari Indeks Pembangunan Manusia Indonesia Perbandingan
Antar Propinsi 1990 - 1993, Hal 9, kecuali untuk PPF

1.2.7. Angka melek huruf (Lit) dan rata-rata lama sekolah (MYS)

Indikator melek huruf dan rata-rata lama sekolah dimaksudkan untuk mencerminkan tingkat pengetahuan dan ketrampilan penduduk. Pendidikan sangat penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia seperti yang disebutkan dalam pembukaan UUD 1945 yaitu salah satu upaya untuk mencerdaskan bangsa. Bangsa yang cerdas akan mempunyai pengetahuan yang luas sehingga akan meningkatkan ketrampilan mereka. Dengan bekal pengetahuan dan ketrampilan yang memadai akan memperluas usaha untuk memperoleh kesempatan mendapatkan kesejahteraannya.

Indikator melek huruf dan rata-rata lama sekolah dimaksudkan untuk mencerminkan tingkat pengetahuan dan ketrampilan penduduk.

Melek huruf (Lit) menurut konsep yang biasa digunakan setiap sensus atau survei: " mampu membaca dan menulis". Ada sedikit perubahan akan mempengaruhi hasil yang diperolehnya, misalnya diubah menjadi "mampu membaca pesan tertulis sederhana". Demikian juga apabila dalam pengumpulan datanya menggunakan

alat peraga. Tetapi di Indonesia angka melek huruf ditanyakan "mampu membaca dan menulis" saja.

Catatan lain mengenai Lit adalah indikator tersebut tidak terlalu peka menggambarkan variasi antar kabupaten/kota. Dampak kelemahan tersebut berkurang dengan memasukkan MYS dalam penghitungan rata-rata indeks pendidikan (IP) yang menurut UNDP dihitung dengan cara sebagai berikut :

$$IP = \frac{2}{3} \text{ Indeks Lit} + \frac{1}{3} \text{ Indeks MYS}$$

Populasi yang digunakan UNDP untuk penghitungan MYS dibatasi pada penduduk berumur 15 tahun ke atas. Batasan itu diperlukan agar angkanya lebih mencerminkan kondisi sebenarnya mengingat penduduk yang berusia kurang dari 15 tahun masih dalam proses sekolah sehingga belum pantas ditanyakan MYS-nya. Langkah pertama adalah memberikan bobot variabel "pendidikan"/jenjang pendidikan sebagaimana disajikan pada tabel. Langkah selanjutnya menghitung rata-rata tertimbang dari variabel tersebut sesuai bobotnya. Secara sederhana prosedur penghitungan tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$MYS = \frac{\sum_{i=1}^7 (f_i \times S_i)}{\sum_{i=1}^7 f_i}$$

dimana :

MYS : rata-rata lama sekolah (dalam tahun);

f_i : frekuensi penduduk yang berumur 15 tahun keatas untuk jenjang pendidikan ke-i;

S_i : skor masing-masing jenjang pendidikan ke-i;

i : jenjang pendidikan ($i = 1,2,\dots,7$);

Tabel 1.4. Jenjang Pendidikan dan Skor yang Digunakan untuk Menghitung Rata-rata Lama Sekolah (MYS)

Jenjang Pendidikan	Skor
(1)	(2)
1. Tidak/belum pernah sekolah	0
2. Belum tamat SD	3
3. Tamat SD	6
4. Tamat SMP	9
5. Tamat SMA	12
6. Tamat D3	15
7. Tamat D4/Sarjana	16,5

1.2.8. Pengukuran Purchasing Power Parity (PPP)

Dasar penghitungan PPP yang digunakan UNDP (United Nations Development Programme) adalah Gross National Product (GNP). Karena GNP tidak dapat dibandingkan secara langsung, maka dibentuk proyek berskala Internasional (International Comparison Project/ICP) dengan tugas utama "menyesuaikan" angka riil GNP sehingga dapat dibandingkan. Untuk maksud ini ditentukan sejumlah komoditi sebagai paket untuk perbandingan secara internasional. Angka yang dihasilkan, untuk mencerminkan daya manfaat yang standar, masih "disesuaikan" lagi dengan *formula Atkinson*.

Penyesuaian tersebut dianggap perlu, karena kenaikan \$ US 500 bagi negara yang sudah memiliki GNP \$ US 5000 akan memiliki manfaat yang berbeda dengan kenaikan yang sama bagi negara yang baru mempunyai GNP \$ US 1000. Penyesuaian dengan formula Atkinson pada dasarnya menggunakan prinsip *diminishing marginal utility* yang secara matematis dapat dinyatakan sebagai berikut :

$$\begin{aligned}
 \text{Adjusted } Y^{**}_{(i)} &= Y^*_{(i)} && \text{jika } Y^*_{(i)} \leq Z \\
 &= Z + 2(Y^*_{(i)} - Z)^{(1/2)} && \text{jika } Z < Y^*_{(i)} \leq 2Z \\
 &= Z + 2(Z)^{(1/2)} + 3(Y^*_{(i)} - 2Z)^{(1/3)} && \text{jika } 2Z < Y^*_{(i)} \leq 3Z \\
 &= Z + 2(Z)^{(1/2)} + 3(Z)^{(1/3)} + 4(Y^*_{(i)} - 3Z)^{(1/4)} && \text{jika } 3Z < Y^*_{(i)} \leq 4Z
 \end{aligned}$$

dimana :

$Y^{**}_{(i)}$ = GNP riil yang sudah disesuaikan dengan PPP

Z = "threshold" atau tingkat pendapatan tertentu yang digunakan sebagai batas kecukupan (biasanya menggunakan garis kemiskinan)

Untuk mengukur "daya beli" penduduk antar kabupaten/kota sebenarnya tersedia berbagai alternatif seperti PDRB; rata-rata konsumsi dari Susenas ditimbang dengan Indeks Harga Konsumen (IHK); dan rata-rata konsumsi dari Susenas yang disesuaikan dengan indeks PPP. Hasil evaluasi secara cermat menunjukkan bahwa indikator terakhir dianggap paling baik sebagai ukuran daya beli antar propinsi. PDRB tidak digunakan karena, penduduk suatu kabupaten tidak langsung menikmati hasil produksi di masing-masing kabupaten. Rata-rata konsumsi yang dikoreksi dengan IHK tidak dipilih sebagai indikator PPP karena IHK hanya mencerminkan perbedaan daya beli daerah perkotaan. Disamping itu paket komoditi yang dipergunakan dalam penghitungan IHK kurang mencerminkan kondisi pada saat tertentu karena hanya ditentukan dalam 5 atau 10 tahun sekali (*out of date*). Lebih lanjut, indeks yang dihasilkan hanya benar untuk perbandingan antara dua kabupaten/kota (tepatnya antara Semarang yang dijadikan tolok ukur dengan kabupaten/kota lain) atau *binary comparison*. Namun demikian, angka IHK di 35 kabupaten/kota tetap digunakan sebagai deflator dalam menghitung nilai perkiraan nilai PPP antar kabupaten/kota dalam harga konstan.

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dalam studi ini "daya beli" diukur dengan PPP yang dihitung berdasarkan tahapan sebagai berikut :

1. Menghitung angka rata-rata pengeluaran per kapita per bulan untuk setiap kabupaten/ kota dengan menggunakan data Susenas 2007 yang mencakup pengeluaran konsumsi untuk semua jenis barang dan jasa. Hasil penghitungan

ini selanjutnya dikalikan 12 untuk memperoleh angka tahunan (dinotasikan dengan E).

2. Menghitung nilai pengeluaran riil (dinotasikan \hat{E}) agar nilai tersebut dapat dibandingkan antar waktu. Cara penghitungannya ialah dengan membagi rata-rata pengeluaran dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) pada tahun 2007 pada masing-masing kabupaten/kota. IHK tersebut dihitung berdasarkan tahun dasar 1996.
3. Menghitung nilai PPP dalam rupiah $Y^*_{(i)}$ dengan rumus :

$$Y^*_{(i)} = \frac{\hat{E}_{(i)}}{R_{(i)}}$$

Dimana

$Y^*_{(i)}$: PPP (rupiah)

$\hat{E}_{(i)}$: Pengeluaran per tahun dalam harga konstan

$R_{(i)}$: PPP (unit)

(i) : Kabupaten/Kota ke-i

4. Menghitung penyesuaian PPP (rupiah) dengan formula Atkinson sebagaimana disajikan sebelumnya ($=Y^{**}_{(i)}$).

BAB II KONDISI PEMBANGUNAN MANUSIA

2.1. Nilai IPM Kabupaten Batang

Nilai IPM Kab. Batang tahun 2008 sebesar 68,9.

Dari hasil penghitungan menunjukkan bahwa nilai IPM Kabupaten Batang tahun 2008 mencapai 68,9. Bila dibandingkan dengan tahun 2007 yang hanya 68,6 maka nilai IPM 2008 mengalami peningkatan sebesar 0,3.

Angka IPM Kabupaten Batang tahun 2008 masih rendah (68,9) dari angka "ideal" 100. Relatif rendahnya angka IPM terutama berkaitan dengan masih rendahnya PPP. Dengan perkataan lain, rendahnya kinerja pembangunan manusia berkaitan dengan masih rendahnya "daya beli" penduduk.

Salah satu acuan untuk melihat posisi pembangunan manusia suatu kabupaten adalah Produk Domestik Regional Bruto yang dihasilkan kabupaten tersebut. PDRB perkapita Kabupaten tahun 2008 lebih besar dari pada tahun 2007. Tahun 2007 pertumbuhan ekonominya sebesar 3,49 % dan setahun kemudian mengalami peningkatan sebesar 0,18 % menjadi sebesar 3,67 %. Untuk mengetahui lebih jelas keadaan perkembangan perekonomian Kabupaten Batang dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 2.1. Indikator Potensi Sosial Ekonomi (PDRB Atas Dasar Harga Berlaku, Tahun dasar 2000) Kabupaten Batang Tahun 2004 – 2008

Tahun	PDRB adhb (rupiah)	PDRB Perkapita (rupiah)	Pertumbuhan Ekonomi (%)
(1)	(2)	(3)	(4)
1. 2004	2.660.650.529,51	3.899.511	2,07
2. 2005	3.110.086.517,37	4.529.850	2,80
3. 2006	3.503.532.450,00	5.060.985	2,51
4. 2007	3.878.725.202	5.563.273	3,49
5. 2008	4.356.752.720	6.202.445	3,67

Sumber: BPS Kabupaten Batang

2.2. Angka Komponen IPM Kabupaten Batang

2.2.1. Hasil Penghitungan PPP

Keberhasilan pembangunan yang telah dirasakan oleh masyarakat Kabupaten Batang khususnya, diharapkan memberi dampak positif terutama yang berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan penduduk. Kesejahteraan penduduk memang tidak mudah untuk diukur karena tidak dapat dilihat. Untuk itu dicoba suatu alat ukur untuk melihat kondisi "kesejahteraan masyarakat", meskipun yang diamati hanya kesejahteraan fisik. Alat yang digunakan tersebut adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang merupakan indeks komposit dari beberapa indeks. Indeks ini pada dasarnya dapat digunakan untuk membandingkan daerah yang satu dengan daerah yang lain pada suatu periode tertentu. Dengan kata lain, untuk melihat seberapa jauh kemampuan pertumbuhan dan pemerataan hasil pembangunan, yang memberikan output berupa peningkatan kebutuhan fisik dasar manusia. Salah satu komponen yang digunakan adalah komponen pendapatan.

Komponen pendapatan atau lebih dikenal sebagai indikator PPP sebagai ukuran "paritas daya beli", mengukur kemampuan dalam mengakses sumber daya ekonomi dalam arti luas. IPM secara konseptual jelas lebih lengkap dalam merefleksikan taraf pembangunan manusia daripada IMH. Karena IMH yang tinggi hanya merefleksikan kondisi suatu masyarakat yang memiliki peluang hidup panjang (dan sehat) serta tingkat pendidikan (dan ketrampilan) yang memadai. Menurut UNDP kondisi tersebut belum memberikan gambaran yang ideal karena belum memasukkan aspek peluang kerja/berusaha yang memadai, sehingga memperoleh sejumlah "uang" yang memiliki daya beli (*purchasing power*). Pemenuhan kebutuhan seperti itu yang dicoba diukur dengan PPP.

Dalam pembahasan ini salah satu wilayah di Jawa Tengah yang akan dihitung nilai komponen dan indeks komponennya adalah Kabupaten Batang. Daerah ini merupakan salah satu kabupaten di daerah pantura Propinsi Jawa Tengah dengan potensi sumber daya alamnya terutama pertanian. Pertumbuhan ekonomi di daerah ini sebesar 3,67 % pada tahun 2008. Nilai PDRB per kapita Kabupaten Batang pada tahun 2008 mencapai 6,202 juta rupiah atas dasar harga berlaku.

Komposisi pengeluaran penduduk dapat dijadikan sebagai salah satu ukuran tingkat kesejahteraan penduduk suatu wilayah. Semakin kecil pengeluaran penduduk untuk konsumsi makanan merupakan indikasi tingkat kesejahteraan yang semakin baik. Pengeluaran untuk konsumsi makanan dan bukan makanan berkaitan erat dengan tingkat pendapatan masyarakat. Pengeluaran makanan dan bukan makanan selama ini menggunakan data hasil Susenas, dan digunakan sebagai salah satu komponen dalam penghitungan indeks PPP.

Tabel 2.2. Persentase Rumahtangga Kabupaten Batang Menurut Golongan Pengeluaran Per Rumahtangga Sebulan Tahun 2007 dan 2008

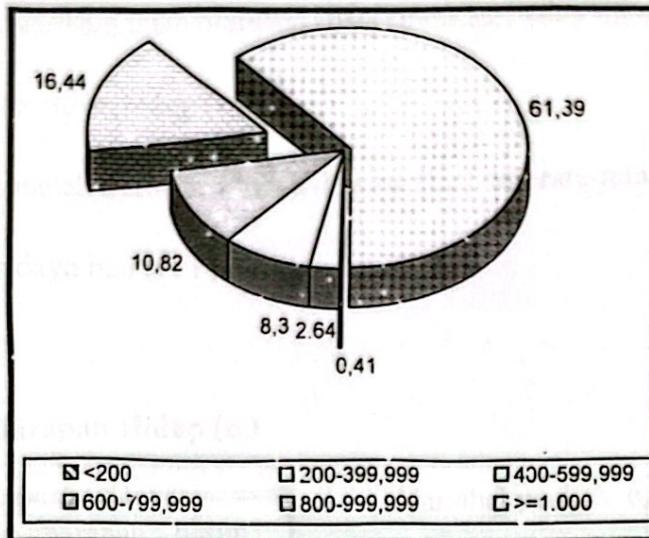
Golongan Pengeluaran Per Rumahtangga sebulan (000)	2007	2008
(1)	(2)	(3)
1. <200	0,26	0,41
2. 200 – 399,999	5,53	2,64
3. 400 – 599,999	21,24	8,30
4. 600 – 799,999	24,53	10,82
5. 800 – 999,999	19,19	16,44
6. ≥1.000	29,25	61,39

Sumber: BPS Kabupaten Batang

Pola pengeluaran rumahtangga Kabupaten Batang per bulan sangat menarik untuk dianalisa karena sebagian besar berada pada tingkat pengeluaran $\geq 1000.000,00$ rupiah merupakan persentase pengeluaran tertinggi yaitu sebesar 61,39 % kemudian disusul golongan pengeluaran Rp 800.000,00 – 999.999,00 yaitu sebesar 16,44%. Untuk golongan pengeluaran terkecil (<200.000,00 rupiah) sebesar 0,41%.

Sehingga secara keseluruhan bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya maka kondisi tahun 2008 mengalami pergeseran, yang cenderung semakin meningkat jumlah pengeluarannya. Akan tetapi untuk golongan pengeluaran lebih besar dari 600.000 – 799.999 rupiah dan lebih besar dari satu juta rupiah mengalami peningkatan, hal ini disebabkan oleh kenaikan harga baik makanan maupun non makanan sebagai dampak kenaikan harga BBM. Nominal uang yang dibelanjakan menunjukkan adanya peningkatan tetapi jumlah barang/jasa yang diperoleh mungkin lebih sedikit dibanding ketika harga BBM belum naik.

Gambar 1. Persentase Rumahtangga Kabupaten Batang Menurut Golongan Pengeluaran Per Rumahtangga Sebulan (000) Tahun 2008



Dari data tersebut secara riil belum dapat diukur sampai seberapa jauh peningkatan yang sebenarnya dari pendapatan penduduk, mengingat pendekatan yang dilakukan dari sisi pengeluaran. Sudah barang tentu pengaruh kenaikan harga barang yang dikonsumsi masih termasuk di dalam pengeluaran rumahtangga.

Pola konsumsi rumahtangga di Kabupaten Batang sebagian besar masih untuk pengeluaran makanan yaitu 53,73% dan (46,21%) untuk non makanan.

Tahun 2008, pola konsumsi rumahtangga di Kabupaten Batang sebagian besar masih untuk pengeluaran makanan yaitu 53,73% dan sisanya (46,21%) untuk non makanan. Kondisi ini menggambarkan bahwa sebagian besar pengeluaran rumahtangga di Kabupaten Batang masih digunakan untuk pemenuhan kebutuhan pangan yang merupakan kebutuhan primer.

2.2.2. Komponen dari IPM

Berdasarkan pedoman yang dikeluarkan UNDP, untuk menyusun indeks komposit pembangunan manusia (IPM) indikator yang diperlukan adalah :

- a. Angka harapan hidup (e_0)
- b. Angka melek huruf penduduk dewasa (Lit) dan rata-rata lama sekolah (MYS)
- c. Paritas daya beli (PPP)

2.2.2.1. Angka Harapan Hidup (e_0)

Angka harapan hidup (e_0) Kabupaten Baiang mencapai 69,3 tahun.

Variabel/peubah e_0 diharapkan menjadi indikator "lama hidup" sekaligus "hidup sehat" suatu masyarakat. Hal itu sebenarnya "berlebihan" mengingat angka morbiditas akan lebih valid dalam mengukur "hidup sehat". Walaupun demikian, karena hanya sedikit negara yang memiliki data morbiditas yang dapat dipercaya maka variabel tersebut tidak digunakan untuk tujuan perbandingan. Sebenarnya dalam Susenas, variabel morbiditas telah dikumpulkan datanya sehingga dapat digunakan untuk tujuan perbandingan namun sejauh ini belum diketahui tingkat kecermatannya sehingga belum digunakan dalam studi ini.

Untuk tahun 2008 estimasi angka e_0 yang digunakan diperoleh dari angka Susenas 2008. Pendekatan yang digunakan untuk estimasi e_0 adalah anak yang pernah dilahirkan hidup (ALH) dan anak yang masih hidup dari wanita pernah kawin berumur 15-49 tahun. Dengan menggunakan paket program MORTPAK-LITE maka akan diperoleh angka harapan hidup (e_0). Tabel 2.3 memperlihatkan bahwa angka harapan hidup penduduk Kabupaten Batang mencapai 69,3 tahun.

2.2.2.2. Angka Melek Huruf (Lit)

Angka melek huruf (Lit) Kabupaten Batang sebesar 84,95.

Kemampuan baca tulis dipandang sebagai kemampuan dasar minimal yang harus dimiliki oleh penduduk. Angka Melek Huruf merupakan indikator pendidikan yang menunjukkan banyaknya penduduk yang mampu membaca dan menulis dan sekaligus menggambarkan tentang kualitas penduduk secara umum. Angka melek huruf merupakan rasio penduduk berumur 15 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis (baik huruf latin maupun lainnya) dengan seluruh penduduk berumur 15 tahun ke atas. Angka Lit Kabupaten Batang pada tahun 2008 mencapai 84,95 persen.

2.2.2.3. Rata-rata Lama Sekolah (MYS)

Rata-rata lama sekolah (MYS) Kabupaten Batang sebesar 6,89 tahun.

Seperti halnya Angka Melek Huruf (Lit), rata-rata lama sekolah (MYS) merupakan indikator pendidikan yang diharapkan dapat menggambarkan tingkat pengetahuan dan keterampilan secara umum yang dimiliki oleh penduduk. Populasi yang digunakan UNDP untuk penghitungan MYS dibatasi pada penduduk berumur 15 tahun ke atas. Batasan itu diperlukan agar angkanya lebih mencerminkan kondisi sebenarnya mengingat penduduk yang berusia kurang dari 15 tahun masih dalam proses sekolah sehingga belum pantas ditanyakan MYS-nya. Data yang digunakan untuk penghitungan MYS adalah data hasil Susenas 2008. MYS Kabupaten Batang sebesar 6,89 tahun.

Berdasarkan hasil Susenas diperoleh bahwa lamanya penduduk bersekolah secara rata-rata masih rendah (dibawah 7 tahun). Hal ini berarti secara rata-rata tingkat pendidikan penduduk dewasa (15 tahun ke atas) di Kabupaten Batang baru tamat Sekolah Dasar.

2.2.2.4. Purchasing Power Parity (PPP)

PPP Kabupaten Batang sebesar 1.390,3 ribu rupiah.

Gambaran mengenai kemampuan daya beli masyarakat dapat diperoleh dari besarnya angka PPP. Nilai PPP Kabupaten Batang pada tahun 2008 sebesar 1.390,3 ribu rupiah. Nilai tersebut mengalami peningkatan bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya (844,6 ribu rupiah).

Tabel 2.3. Komponen Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Batang Tahun 2007 dan 2008

Komponen IPM	2007	2008
(1)	(2)	(3)
1. Harapan Hidup (E_0)	69,2	69,3
2. Melek Huruf (Lit)	86,29	84,95
3. Rata-rata Lama Sekolah (MYS)	6,14	6,89
4. PPP (000 Rp)	844,6	1.390,3

Sumber : Diolah dari Susenas 2007 dan 2008

BAB III BIDANG KESEHATAN

Perbaikan kesehatan masyarakat dikembangkan melalui Sistem Kesehatan Nasional yaitu dengan mengusahakan peningkatan partisipasi aktif masyarakat dalam bidang kesehatan yang diarahkan terutama kepada golongan masyarakat yang berpenghasilan rendah.

Bidang kesehatan memegang peranan sangat penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan dibidang kesehatan bertujuan agar semua lapisan masyarakat dapat memperoleh pelayanan kesehatan secara mudah, merata dan murah, sehingga akan tercapai derajat kesehatan masyarakat yang baik.

Upaya perbaikan kesehatan masyarakat dikembangkan melalui Sistem Kesehatan Nasional yaitu dengan mengusahakan peningkatan partisipasi aktif masyarakat dalam bidang

kesehatan yang diarahkan terutama kepada golongan masyarakat yang berpenghasilan rendah. Bidang kesehatan merupakan hal yang sangat berkaitan dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Kondisi kesehatan penting dalam mempengaruhi kesejahteraan masyarakat, karena kesejahteraan yang diperoleh hanya dapat dinikmati oleh manusia yang sehat. Tingkat kesehatan juga akan sangat berpengaruh pada harapan hidup. Semakin tinggi derajat kesehatan seseorang semakin tinggi harapan hidupnya. Dengan harapan hidup yang tinggi, maka kesempatan untuk mendapatkan dan menikmati kesejahteraan juga akan semakin besar.

Kondisi kesehatan masyarakat Kabupaten Batang akan dipaparkan dengan menggunakan beberapa indikator kesehatan. Indikator kesehatan yang akan dilihat yaitu mulai dari penolong persalinan pertama sampai dengan pemeriksaan dan perawatan kesehatan. Selain itu akan dilihat juga kondisi perumahan, karena terdapat hubungan yang signifikan antara fasilitas perumahan dengan derajat kesehatan.

3.1. Keluhan Kesehatan

Keluhan kesehatan merupakan kondisi dimana seseorang merasakan adanya gangguan kesehatan atau kejiwaan, baik karena penyakit akut, penyakit kronis, kecelakaan, kriminal atau hal lain. Pada tahun 2008 persentase penduduk yang mengalami keluhan kesehatan sebesar 27,58 %, kondisi tersebut tidak jauh berbeda bila dibandingkan dengan tahun 2007 (28,08%). Dengan jenis keluhan terbanyak adalah pilek (25,88%), batuk (24,08%), lainnya (14,96%) dan panas (11,83%).

Penderita laki-laki relatif lebih sedikit jika dibandingkan penderita perempuan, yaitu 44,86% untuk laki-laki dan 55,14% penderita perempuan.

Tabel 3.1. Persentase Penderita Keluhan Kesehatan di Kabupaten Batang Tahun 2007 dan 2008

Penderita	2007	2008
(1)	(2)	(3)
1. Laki-laki	54,03	44,86
2. Perempuan	45,97	55,14
TOTAL	100,00	100,00

Sumber: BPS Kabupaten Batang

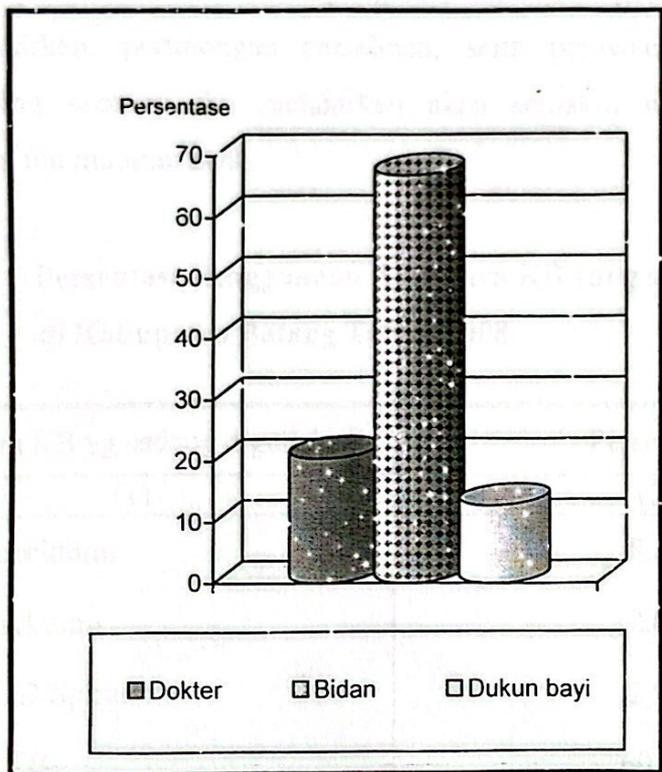
3.2. Penolong Kelahiran Pertama

Penolong kelahiran pertama sangat mempengaruhi kondisi bayi dan ibu yang melahirkan. Pada tahun 2008 penolong kelahiran sebagian besar ditangani oleh bidan sebesar 66,87 %, dan disusul Dokter sebesar 20,43 % dan dukun bayi yaitu sebesar 12,71 %. Secara keseluruhan penolong kelahiran pertama yang ada di Kabupaten Batang didominasi oleh tenaga bidan dan dokter, peranan dukun bayi dalam pertolongan persalinan berangsur-angsur menunjukkan adanya penurunan, hal ini mengindikasikan bahwa paradigma yang berkembang di masyarakat sudah semakin baik tentang penolong persalinan bayi.

Persentase penolong kelahiran pertama oleh bidan bayi sebesar 66,87 % dan dukun bayi sebesar 12,71 %.

Keberadaan dukun bayi tidak bisa diabaikan karena ketergantungan masyarakat terhadap dukun bayi masih cukup banyak. Sehingga pembinaan dan penyuluhan terhadap dukun bayi harus terus dilaksanakan agar risiko kematian bayi saat persalinan dan awal kelahiran dapat diperkecil. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar 2 berikut ini :

Gambar 2. Persentase Penolong Kelahiran Pertama Tahun 2008



3.3. Keluarga Berencana

Metode kontrasepsi yang paling banyak digunakan adalah suntikan mencapai 60,20 %, kemudian pil KB sebesar 20,87 % dan MOW sebesar 8,82 %.

Keluarga Berencana merupakan salah satu program pemerintah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan keluarga. Keikutsertaan wanita usia subur (15-49 tahun) dengan status kawin dalam keluarga berencana bukan sekedar untuk kepentingan pengendalian pertumbuhan penduduk. Lebih dari itu dengan mengikuti keluarga berencana akan menyangkut juga dengan kesehatan ibu dan anak. Antara lain yang berpengaruh langsung yaitu banyaknya jumlah melahirkan, pertolongan persalinan, serta perawatan awal kelahiran. Semakin sering seorang ibu melahirkan akan semakin memperbesar resiko kematian pada ibu maupun anak.

Tabel 3.2. Persentase Penggunaan Alat/Cara KB yang sedang digunakan di Kabupaten Batang Tahun 2008

Alat/cara KB yg sedang digunakan	Persentase
(1)	(2)
MOW/Tubektomi	8,82
MOP/Vasektomi	2,02
AKDR/IUD/Spiral	2,99
Suntikan KB	60,20
Susuk KB/Norplan/Implanon/Alwalit	3,87
Pil KB	20,87
Kondom/karet KB	1,23

Sumber: BPS Kabupaten Batang

Pada tahun 2008 peserta KB metode kontrasepsi yang paling banyak digunakan adalah suntikan 60,20 %. Kemudian disusul oleh penggunaan pil sebesar 20,87 % dan tempat ketiga adalah pemakai MOW/Tubektomi yaitu sebesar 8,82 %, tempat keempat adalah pemakai susuk KB/Norplan/Implanon/Alwalit yaitu sebesar 3,87 %, kelima adalah AKDR/IUD/Spiral yaitu sebesar 2,99 %. Sedangkan pemakaian alat/cara KB Kondom/karet KB berada di bawah satu setengah persen.

Banyaknya anak yang dilahirkan oleh seorang wanita dipengaruhi oleh masa suburnya. Semakin banyak perkawinan yang dilakukan pada usia muda akan semakin banyak kemungkinan anak yang dilahirkan. Untuk mengetahui hal tersebut dapat dilihat pada usia perkawinan pertama seorang wanita.

Tabel 3.3. Persentase Wanita Pernah Kawin (10 tahun keatas) Menurut Umur Perkawinan Pertama Tahun 2007 & 2008

Usia Perawinan Pertama	2007	2008
(1)	(2)	(3)
1. <= 16 tahun	32,47	32,75
2. 17 – 18 tahun	25,66	33,82
3. 19 – 24 tahun	35,13	26,27
4. 25 +	6,75	7,16
Jumlah	100,00	100,00

Sumber: BPS Kabupaten Batang

Dari hasil susenas 2008 perkawinan pertama unuuk wanita di Kabupaten Batang terbanyak terjadi pada usia 17 - 18 tahun (33,82 %). Kemudian disusui oleh kelompok usia <= 16 tahun sebesar 32,75 %. Untuk kelompok usia perkawinan pertamanya 19 - 24 tahun mencapai 26,27 % sedangkan untuk usia perkawinan pertamanya diatas 25 tahun (25+) hanya 7,16 %.

3.4. Perumahan

Salah satu kebutuhan pokok manusia adalah mendapatkan rumah dan lingkungan yang nyaman, aman dan sehat. Arti fisik perumahan, dalam konteks yang diperluas disebut permukiman, yaitu tempat tinggal anggota masyarakat dan individu-individu yang biasanya hidup dalam ikatan perkawinan atau keluarga beserta berbagai fasilitas pendukungnya. Perumahan menjadi untuk tumbuh, hidup, berinteraksi, perlindungan dari gangguan dan fungsi lainnya bagi penghuninya. Rumah yang layak adalah rumah yang memenuhi syarat-syarat kesehatan dan estetika sehingga memberikan suasana yang nyaman bagi penghuninya. Dengan demikian, kelayakan sebuah rumah dapat dicerminkan oleh fasilitas yang tersedia.

Kelengkapan fasilitas suatu rumah mempunyai korelasi positif dengan biaya yang harus dikeluarkan untuk rumah tersebut. Semakin lengkap fasilitas suatu rumah akan semakin besar biaya yang dikeluarkan. Dengan demikian semakin tinggi status sosial ekonomi, keadaan rumah semakin lengkap dan bermutu baik. Lengkap artinya fasilitas yang dimiliki rumah tersebut, seperti listrik, telepon, air dan jaringan drainase, serta sistem pembuangan kotoran, semuanya tersedia.

Kondisi perumahan suatu masyarakat dapat dilihat melalui satu paket indikator yang menurut UNCHS (1993) terbagi menjadi : kemampuan memiliki rumah, pembiayaan perumahan, kualitas perumahan, produksi perumahan, subsidi perumahan dan pemeriksaan pengaturan perumahan.

Yang dapat dikumpulkan melalui pendekatan rumah tangga utamanya susenas, dapat dibentuk indikator-indikator perumahan adalah sebagai berikut : kondisi fisik bangunan (rata-rata luas lantai sebagian besar rumah yang dihuni rumah tangga), penguasaan tempat tinggal (status penguasaan bangunan tempat tinggal yang ditempati), utilitas dan fasilitas tempat tinggal (penggunaan fasilitas tempat buang air besar, sumber air minum yang digunakan dan jarak ke tempat penampungan kotoran). Jumlah rumah tangga di Kabupaten Batang pada tahun 2008 mencapai 166.650 rumah tangga.

Kondisi fisik bangunan menunjukkan kualitas dan kuantitas tempat tinggal yang dikuasai, baik milik sendiri ataupun bukan. Fisik bangunan yang kuat dan terbuat dari bahan-bahan yang tidak membahayakan sehingga menjamin keamanan penghuni, tidak saja dari ancaman tindak kriminal, tetapi juga dari kerentanan bangunan itu sendiri dan

Kondisi fisik bangunan di Kabupaten Batang menurut rata-rata luas lantai 50 – 99 m mencapai 61,68 %.

kemungkinan terserang penyakit. Rata-rata luas lantai (hunian) per rumahtangga dapat digunakan untuk menggambarkan kondisi tempat tinggal penduduk.

Semakin luas lantai yang dihuni oleh suatu rumahtangga, semakin baik kondisi (kesehatan) rumahtangga tersebut. Rata-rata luas lantai 50-99 m di Kabupaten Batang tahun 2008 yaitu sebesar 61,68 % dari 166.650 rumahtangga. Rumahtangga dengan rata-rata luas lantai < 20 m mencapai 0,89 % sedangkan rumahtangga dengan rata-rata luas lantai > 150 m yaitu sebesar 6,41 % (tabel 3.4)

Tabel 3.4. Persentase Jenis Lantai yang Digunakan Rumah Tangga di Kabupaten Batang Tahun 2008

Luas lantai bangunan (meter)	2008
(1)	(2)
< 20	0,89
20 - 49	15,68
50 - 99	61,68
100 - 149	15,34
150 +	6,41

Sumber: BPS Kabupaten Batang

Penguasaan tempat tinggal, memperlihatkan status rumah tersebut apakah milik sendiri, kontrak, sewa, bebas sewa, dinas, milik orang tua / sanak / saudara atau lainnya. Demikian pula dengan status hukum tanah yang dipakai untuk mendirikan bangunan

tempat tinggal (hak milik, hak guna bangunan, hak pakai). Semakin tinggi persentase rumah tangga yang menempati tempat tinggal milik sendiri pada suatu daerah, maka semakin baik pula tingkat kesejahteraan daerah tersebut. Khususnya di Kabupaten Batang rumahtangga yang menempati bangunan tempat tinggal milik sendiri sebesar 92,12 %, lainnya sebesar 5,20 %, milik orang tua / sanak / saudara sebesar 0,59 %, bebas sewa/dinas 1,19 % dan yang mengontrak hanya 0,59 %, selengkapnya disajikan pada tabel 3.5.

Tabel 3.5. Persentase Status Bangunan Tempat tinggal yang Ditempati Rumah Tangga di Kabupaten Batang Tahun 2008

Status Bangunan	2008
(1)	(2)
Milik sendiri	92,12
Kontrak	0,59
Sewa	0,30
Dinas	1,19
Milik orangtua / sanak / saudara	0,59
Lainnya	5,20

Sumber: BPS Kabupaten Batang

Utilitas dan fasilitas tempat tinggal menunjukkan kelengkapan dan fasilitas serta penggunaan tempat tinggal seperti listrik, telepon dan lain-lain. Semakin lengkap fasilitas dan utilitas hunian suatu rumah, maka menunjukkan bahwa rumahtangga tersebut semakin nyaman tinggal di rumah tersebut. Persentase rumahtangga yang sudah

menggunakan air bersih di suatu daerah dapat digunakan untuk menunjukkan tingkat kesejahteraan. Semakin tinggi persentase rumahtangga yang menggunakan air bersih di suatu daerah menunjukkan semakin baiknya kondisi kesehatan rumahtangga di daerah tersebut. Untuk pemakaian sumber air bersih/air minum oleh rumahtangga terlihat bahwa air sumur masih merupakan tumpuan sebagai sumber air bersih bagi masyarakat di Kabupaten Batang, hal ini terbukti masih mendominasinya rumah tangga yang mengkonsumsi air sumur yaitu sebesar 54,50 %. Sedangkan penggunaan air kemasan dan air ledeng hanya sebesar 11,76 %, sedikit menurun dari tahun sebelumnya (12,88 %). Secara rinci, penggunaan sumber air bersih/air minum dapat dilihat pada tabel 3.6 berikut:

Tabel 3.6. Persentase Sumber Air Bersih/Air Minum Rumah Tangga di Kabupaten Batang Tahun 2008

Sumber Air Bersih / Air Minum	2008
(1)	(2)
1. Leding dan air kemasan	11,76
2. Pompa	5,52
3. Sumur	54,60
4. Mata Air	26,03
5. Lainnya	2,09

Sumber: BPS Kabupaten Batang

Litrik dalam rumahtangga merupakan suatu kebutuhan pokok, tidak hanya digunakan sebagai penerangan saja tetapi juga untuk membantu mempercepat penyelesaian pekerjaan rumahtangga, misalnya untuk memasak. Menurut hasil Susenas Kabupaten Batang tahun 2008 dari 166.650 rumahtangga menunjukkan bahwa 97,31 % telah menggunakan listrik sebagai penerangan rumahtangga, pengguna listrik non PLN sebesar 1,50 %. Kemudian yang menggunakan petromak/aladin sekitar 0,15 % dan yang menggunakan pelita/sentir/obor/lainnya 1,05 %, selengkapnya disajikan pada tabel 3.7.

Tabel 3.7. Persentase Rumah Tangga Menurut Sumber Penerangan Yang Digunakan di Kabupaten Batang 2008

Jenis Sumber Penerangan	2008
(1)	(2)
1. Listrik PLN	97,31
2. Listrik Non PLN	1,50
3. Petromak/Aladin	0,15
4. Pelita/Sentir/Obor/Lainnya	1,05

Sumber: BPS Kabupaten Batang

Fasilitas lain yang menyangkut kesehatan lingkungan suatu rumah tangga yaitu tempat pembuangan/fasilitas buang air besar. Pemilikan sarana tempat buang air besar

yang layak, menggambarkan adanya sistem sanitasi lingkungan yang sehat. Persentase penggunaan fasilitas buang air besar untuk milik sendiri mencapai 42,93 % untuk tahun 2008. Bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya kondisi tersebut sedikit mengalami peningkatan (45,24 % tahun 2007). Sedangkan rumahtangga yang sama sekali tidak mempunyai fasilitas buang air yaitu sebesar 43,93 %, jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu tahun 2007 (43,94 %) mengalami sedikit penurunan. Selengkapnya penggunaan fasilitas buang air besar disajikan pada tabel 3.8.

Dengan meningkatnya jumlah rumahtangga yang memiliki sendiri fasilitas buang air besar menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat di Kabupaten Batang untuk hidup sehat mengalami peningkatan.

Tabel 3.8. Persentase Rumah Tangga Menurut Penggunaan Fasilitas Buang Air Besar di Kabupaten Batang 2008

Fasilitas	2008
(1)	(2)
1. Milik Sendiri	42,93
2. Milik Bersama	7,46
3. Umum	5,68
4. Tidak ada	43,93

Sumber: BPS Kabupaten Batang

Fasilitas perumahan selanjutnya adalah jarak ke tempat pembuangan kotoran/tinja terdekat bagi rumahtangga yang menggunakan sumber air minum menggunakan pompa, sumur terlindung, sumur tak terlindung, mata air terlindung, mata air tak terlindung. Sedangkan rumahtangga yang menggunakan sumber air minum dengan air dalam kemasan, leding dan pompa diasumsikan telah menggunakan air minum yang sehat menurut standar kesehatan. Di Kabupaten Batang pembuangan kotoran/tinja terdekat yang kurang dari 10 meter mencapai sebesar 22,68 %, lebih besar 10 meter 40,72 % dan rumahtangga yang tidak tahu 36,60 %. Pada tabel 3.8 memperlihatkan bahwa sebagian besar rumah tangga mempunyai jarak ke tempat pembuangan kotoran/tinja terdekat sudah memenuhi syarat kesehatan, yaitu lebih besar dari 10 meter, karena bakteri E-coli masih dapat berkembang bila jarak ke tempat pembuangan kotoran/tinja terdekat kurang dari 10 meter sehingga air dimungkinkan tidak sehat lagi.

Tabel 3.9. Persentase Rumah Tangga Menurut Jarak keTempat Penampungan Kotoran/tinja di Kabupaten Batang Tahun 2008

Jarak ke Penampungan	2008
(1)	(2)
<= 10 meter	22,68
> 10 meter	40,72
Tidak Tahu	36,60

Sumber: BPS Kabupaten Batang

3.5. Fasilitas Kesehatan

Tersedianya sarana dan prasarana kesehatan merupakan faktor yang penting bagi pemeriksaan dan perawatan kesehatan masyarakat. Oleh karena itu harus ditunjang dengan tersedianya fasilitas kesehatan yang baik. Semakin dekat dan banyak alternatif pelayanan kesehatan akan memudahkan pemantauan keluhan kesehatan yang dirasakan masyarakat sekitar. Diharapkan dengan semakin banyaknya fasilitas kesehatan, informasi tentang cara hidup sehat, pencegahan dan perawatan penyakit dapat lebih menjangkau masyarakat.

**Tabel 3.10. Fasilitas Kesehatan di Kabupaten Batang
Tahun 2007 & 2008**

Fasilitas	2007	2008
(1)	(2)	(3)
1. Puskesmas (unit)	21	21
2. Puskesmas Pembantu (unit)	44	45
3. Rumah Sakit	1	1
4. Dokter (Umum, Spesialis, Gigi)	68	62
5. Perawat	363	315
6. Bidan	254	198
7. Apoteker	3	2

Sumber: Dinas Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial serta RSUD Kabupaten Batang

**Tabel 4.1. Persentase Penduduk Usia 7-12 Tahun Menurut
Partisipasi Sekolah Tahun 2007 & 2008**

Partisipasi Sekolah	2007	2008
1. Tidak/belum pernah sekolah	0,15	0,81
2. Masih bersekolah	99,85	99,19

Sumber: BPS Kabupaten Batang

BAB IV BIDANG PENDIDIKAN

Kualitas Sumber Daya Manusia sangat menentukan keberhasilan pembangunan yang sedang dilakukan. Oleh karena itu berbagai upaya telah dilakukan untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia tersebut, yang salah satunya melalui pembangunan dibidang pendidikan. Hal ini sesuai dengan salah satu tujuan pembangunan nasional yaitu untuk mencerdaskan kehidupan bangsa Faktor pendidikan mempunyai pengaruh positif terhadap segala aspek kehidupan masyarakat. Pendidikan menjadi penting untuk mewujudkan kesejahteraan karena menjadi dasar dari usaha untuk mencapai kesejahteraan tersebut. Dengan pendidikan yang cukup akan diperoleh pengetahuan bagaimana cara hidup sehat, meningkatkan daya beli dan kemampuan untuk bertahan hidup.

4.1. Tingkat Partisipasi Sekolah

Partisipasi penduduk Kabupaten Batang untuk menyekolahkan anak umur 7-12 tahun di sekolah dasar relatif besar. Ini menunjukkan kesadaran masyarakat sudah cukup tinggi untuk menyekolahkan anaknya. Hal tersebut dapat dilihat dari persentase penduduk umur 7 – 12 tahun yang masih bersekolah sebesar 99,16 % untuk tahun 2008. Sedangkan yang tidak bersekolah lagi dan tidak/belum pernah sekolah yaitu sebesar 0,84 %.

Tabel 4.1. Persentase Penduduk Umur 7-12 Tahun Menurut Partisipasi Sekolah Tahun 2007 & 2008

Partisipasi Sekolah	2007	2008
(1)	(2)	(3)
1. Tidak/belum pernah sekolah/ Tidak bersekolah lagi	0,93	0,84
2. Masih bersekolah	99,07	99,16

Sumber: BPS Kabupaten Batang

Penduduk yang masih sekolah untuk usia 7-12 tahun sebesar 99,07 % dan usia 13-15 tahun sebesar 78,72 %.

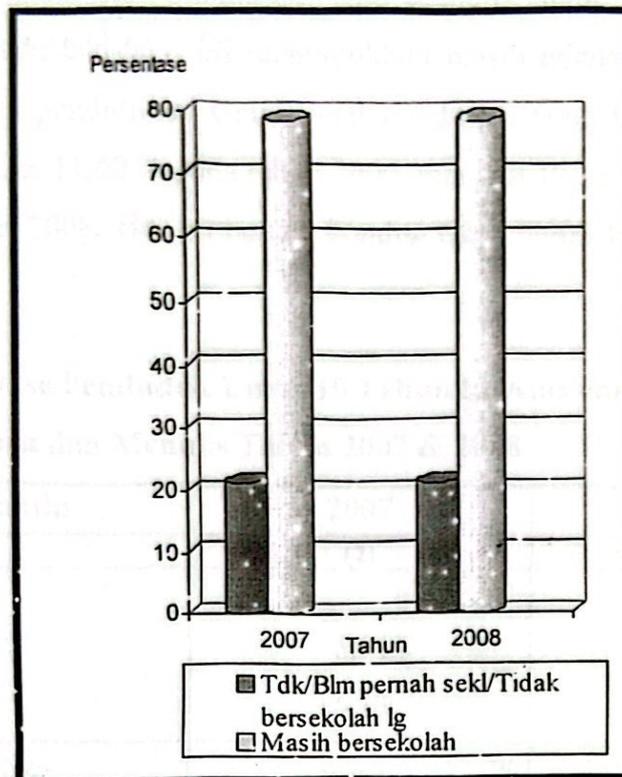
Program wajib belajar 9 tahun yang dicanangkan pemerintah untuk peningkatan sumber daya manusia mewajibkan seorang anak menyelesaikan sekolah minimal sampai tingkat lanjutan pertama. Program ini sesungguhnya sekaligus merupakan upaya untuk mencegah bertambahnya penduduk buta huruf dan tidak mampu berbahasa Indonesia, khususnya dari kelompok penduduk usia muda Untuk tahun 2008 tingkat partisipasi sekolah penduduk usia 13 – 15 tahun di Kabupaten Batang mencapai 78,72 %. Akan tetapi masih terdapat anak usia 13 – 15 tahun yang belum/tidak bersekolah/ tidak sekolah lagi sebesar 21,28 %. Informasi persentase partisipasi sekolah penduduk umur 13-15 tahun selengkapnya disajikan pada tabel 4.2.

Tabel 4.2. Persentase Penduduk Umur 13-15 Tahun Menurut Partisipasi Sekolah Tahun 2007 & 2008

Partisipasi Sekolah	2007	2008
(1)	(2)	(3)
1. Tidak/belum pernah sekolah/ Tidak bersekolah lagi	21,19	21,28
2. Masih bersekolah	78,81	78,72

Sumber: BPS Kabupaten Batang

Gambar 3. Persentase Penduduk Umur 13-15 Tahun Menurut Partisipasi Sekolah Tahun 2007 & 2008



4.2. Kemampuan Membaca dan Menulis

Besarnya angka buta huruf di Kabupaten Batang sebesar 13,22 %.

Kemampuan membaca dan menulis seseorang sangat mempengaruhi pengetahuannya. Dewasa ini sangat banyak media massa cetak (seperti : buku, surat kabar dan majalah) yang memberikan informasi/pengetahuan. Dengan membaca dapat membuka dunia cakrawala baru. Bertambahnya wawasan akan mempermudah untuk memperoleh pekerjaan, sehingga secara tidak langsung kemampuan membaca dan menulis dapat meningkatkan kesejahteraan keluarga.

Berdasarkan hasil Susenas 2006, 2007 dan 2008, dapat dilihat adanya peningkatan persentase penduduk laki-laki dan perempuan yang tidak bisa membaca dan menulis (buta huruf). Persentase laki-laki yang buta huruf tahun 2006 sebesar 4,31 %, naik menjadi 8,01 % tahun 2007 dan tahun 2008 menjadi 9,65 %. Sedangkan untuk penduduk perempuan yang buta huruf yaitu dari 7,29 %

tahun 2006 naik lebih dua kali lipat menjadi 16,13 % pada tahun 2007 dan menjadi 16,61 % tahun 2008. Jika dilihat berdasarkan jenis kelaminnya maka persentase penduduk yang tidak bisa membaca dan menulis lebih banyak penduduk perempuan dari pada laki-laki, ini menunjukkan masih adanya prioritas laki-laki untuk mendapatkan pendidikan. Untuk total penduduk yang tidak bisa membaca dan menulis naik dari 11,60 % pada tahun 2006, menjadi 12,11 % pada tahun 2007. dan 13,22 % tahun 2008. Hal ini berarti kondisi tahun 2008 tidak lebih baik dari tahun sebelumnya.

Tabel 4.3. Persentase Penduduk Umur 10 Tahun ke Atas yang Tidak Bisa Membaca dan Menulis Tahun 2007 & 2008

Jenis Kelamin	2007	2008
(1)	(2)	(3)
1. Laki-laki	8,01	9,65
2. Perempuan	16,13	16,61
Total penduduk	12,11	13,22

Sumber: BPS Kabupaten Batang

Sedangkan untuk kemampuan membaca dan menulis ini sering diistilahkan dengan melek huruf. Persentase penduduk melek huruf untuk tahun 2008 sebesar 86,78 % dari total penduduk umur 10 tahun keatas.

Tabel 4.4. Persentase Penduduk Umur 10 Tahun ke Atas Menurut Kemampuan Membaca dan Menulis Tahun 2007 & 2008

Dapat Baca & Tulis	2007	2008
(1)	(2)	(3)
1. Huruf latin dan Huruf Lainnya	87,89	86,78
2. Tidak dapat	12,11	13,22

Sumber: BPS Kabupaten Batang

4.3. Pendidikan Yang Ditamatkan

Pendidikan tertinggi yang ditamatkan merupakan salah satu indikator untuk melihat kualitas sumber daya manusia penduduk berumur 10 tahun ke atas. Untuk mengetahui pendidikan tertinggi yang ditamatkan adalah dengan mengetahui ijazah/STTB tertinggi yang dimiliki.

Penduduk umur 10 tahun keatas di Kab. Batang yang tamat SD sebesar 32,58 % sedangkan yang menamatkan perguruan tinggi hanya 4,78 %.

Berdasarkan tingkat pendidikan yang ditamatkan pada tahun 2008 ternyata sebagian besar berada pada tingkat pendidikan Sekolah Dasar (SD) dan masih terdapat penduduk umur 10 tahun ke atas yang tidak/belum bersekolah (7,59 %).

Persentase penduduk yang tidak/belum tamat SD mencapai 30,52 %, dan yang sudah menamatkannya mencapai 32,58 % dari seluruh penduduk umur 10 tahun keatas. Sedangkan yang tamatan SMP hanya 15,71 %, tamatan SMA/SMK mencapai 8,82 % dan tamatan perguruan tinggi hanya 4,78 %. Secara rinci persentase penduduk menurut tingkat pendidikan dapat dilihat pada tabel 4.5.

Tabel 4.5. Persentase Penduduk Umur 10 Tahun Keatas Menurut Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan Tahun 2007 & 2008

Tingkat Pendidikan	2007	2008
(1)	(2)	(3)
1. Tidak Pernah Sekolah/belum tamat SD	36,50	38,11
2. Tamat SD	35,93	32,58
3. SMP	16,13	15,71
4. SMA & SMK	8,74	8,82
6. Perguruan Tinggi	2,70	4,78

Sumber: BPS Kabupaten Batang

4.4. Fasilitas Pendidikan

Fasilitas/sarana pendidikan sangat menunjang untuk berlansungnya proses pendidikan. Di Kabupaten Batang pada tahun 2008 terdapat 706 sekolah yang terbagi mulai dari jenis Sekolah Dasar sampai Sekolah Menengah Atas, dengan jumlah guru sebanyak 7.207 orang. Dilihat dari tingkat pendidikannya maka semakin tinggi tingkat pendidikan semakin sedikit jumlah siswanya.

Tabel 4.6. Fasilitas Pendidikan Dirinci Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2008

Fasilitas Pendidikan	Tingkat Pendidikan		
	SD	SMP	SMA
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Sekolah dikelola Diknas	473	67	13
ó Negeri	472	58	7
ó Swasta	1	9	6
2. Sekolah dikelola Depag	113	29	11
ó Negeri	2	1	1
ó Swasta	111	28	10
3. Jumlah Murid	84.657	34.229	9.219
4. Jumlah Guru	4.836	1.802	569
5. Rasio Murid terhadap Guru	17,51	19,00	16,20

Sumber: Dinas Pendidikan dan Depag Kabupaten Batang

BAB V ANGKATAN KERJA

Besarnya angkatan kerja di Kabupaten Batang mencapai 70,84 %.

Konsep angkatan kerja yang dipakai dalam Sakernas 2008 adalah konsep kegiatan seminggu sebelum pencacahan bagi penduduk yang berumur 15 tahun ke atas. Kegiatan penduduk yang berumur 15 tahun ke atas dibagi menjadi angkatan kerja (apabila kegiatan seminggu sebelum pencacahan adalah bekerja dan mencari kerja) dan bukan angkatan kerja (sekolah, mengurus rumah tangga, jompo dan lain-lain). Dari hasil Sakernas 2008 jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas di Kabupaten Batang mencapai 89,58 %. Sedangkan usia produktif bagi angkatan kerjanya antara umur 15 - 64 tahun mencapai 82,70 %.

Tabel 5.1. Persentase Angkatan Kerja Tahun 2007 & 2008

Penduduk	2007	2008
(1)	(2)	(3)
1. Angkatan Kerja	73,19	70,84
➤ Bekerja	92,08	92,79
➤ Pencari Kerja	7,92	7,21
2. Bukan Angkatan Kerja	26,81	29,16

Sumber: BPS Kabupaten Batang.

Persentase angkatan kerja pada tahun 2008 lebih besar bila dibandingkan dengan tahun 2007. Pada tahun 2007 pencari kerja mencapai 7,92 %, tahun 2008 turun sekitar 0,71 % menjadi 7,21 %.

Sebagian besar penduduk Kabupaten Batang bekerja di bidang pertanian yaitu 35,58 %.

Bila diperhatikan pada angkatan kerja menurut lapangan usaha, bidang pertanian masih merupakan mata pencaharian terbesar yaitu 35,58 %. Hal ini menggambarkan karakteristik daerah di Kabupaten Batang masih sangat mengandalkan sektor pertanian sebagai penyangga perekonomian. Kemudian sektor industri pengolahan menyerap 24,41 % kemudian disusul sektor perdagangan menyerap 18,01 % tenaga kerja dan sektor konstruksi menyerap tenaga kerja 5,95 %.

Tabel 5.2. Persentase Penduduk yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha Tahun 2008

Lapangan Usaha	Persentase
(1)	(2)
1. Pertanian	35,58
2. Pertambangan dan Penggalian	0,61
3. Industri Pengolahan	24,41
4. Listrik, Gas dan Air	0,07
5. Konstruksi	5,95
6. Perdagangan	18,01
7. Komunikasi dan Angkutan	4,13
8. Keuangan dan Real Estate	0,70
9. Jasa dan Lainnya	10,54

Sumber: BPS Kabupaten Batang.

Penduduk yang bekerja menurut status usaha/pekerjaan dapat diperhatikan bahwa pada tahun 2008 persentasenya didominasi oleh pekerja bebas pertanian/non pertanian /pekerja tidak dibayar yaitu sebesar 30,58 %. Kemudian penduduk yang bekerja tanpa buruh mencapai sebesar 27,58 %, buruh/karyawan yang dibayar sebesar 26,01 %, berusaha dibantu buruh tetap sebesar 13,26 % dan berusaha dibantu buruh tidak tetap sebesar 2,23. Jika dibandingkan dengan tahun 2007, kondisi tahun 2008 status pekerjaan penduduk yang bekerja mengalami pergeseran, dapat dilihat pada tabel 5.3. Penduduk yang berusaha tanpa dibantu buruh meningkat dari 23,99 % pada tahun 2007 menjadi

27,58 % untuk tahun 2008, kemudian pekerja sebagai burh/karyawan juga mengalami peningkatan yaitu 23,21 % tahun 2007 menjadi 26,01 % tahun 2008. Sedangkan penduduk yang bekerja sebagai pekerja bebas pertanian/non pertanian /pekerja tidak dibayar cenderung mengalami penurunan dari 32,44 % (tahun 2007) menjadi 30,58 % pada tahun 2008.

**Tabel 5.3. Persentase Penduduk yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan
Tahun 2007 & 2008**

Status Pekerjaan	2007	2008
(1)	(2)	(3)
1. Berusaha :		
· tanpa buruh	23,99	27,58
· dibantu buruh :		
Ø tidak tetap	18,15	13,60
Ø tetap	2,21	2,23
2. Buruh / Karyawan dibayar	23,21	26,01
3. Pekerja bebas pertanian/non pertanian /pekerja tidak dibayar	32,44	30,58

Sumber: BPS Kabupaten Batang.

Kualitas penduduk yang bekerja dapat diukur dari tingkat pendidikan tertinggi yang ditamatkan. Semakin tinggi tingkat pendidikan penduduk yang bekerja, mengindikasikan semakin tinggi pula kualitas tenaga kerja tersebut. Di Kabupaten Batang tahun 2008 ternyata sebagian besar penduduk yang bekerja masih berpendidikan relatif rendah. Sebanyak 68,36 % hanya tamatan sampai dengan SD, sedang yang tamat SMP mencapai 18,16 %, tamat SMA ke atas sebesar 13,48 %.

Tabel 5.4. Persentase Penduduk Yang Bekerja Menurut Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan Tahun 2007 dan 2008

Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan Penduduk	2007	2008
(1)	(2)	(3)
1. ≤ SD	72,20	68,36
2. SMP	17,72	18,16
3. ≥ SMA	10,08	13,48

Sumber: BPS Kabupaten Batang.

Jam kerja (lamanya bekerja) adalah salah satu ukuran untuk mengetahui produktivitas kerja. Pengukuran jam kerja mengasumsikan bahwa semakin lama seseorang bekerja maka semakin tinggi produktivitasnya. Dengan demikian akan berkaitan pula dengan tingkat pendapatan, yang pada akhirnya berpengaruh pula terhadap tingkat kesejahteraan. Berdasarkan asumsi tersebut maka penduduk yang bekerja kurang dari 35 jam dalam seminggu dikategorikan sebagai setengah menganggur.

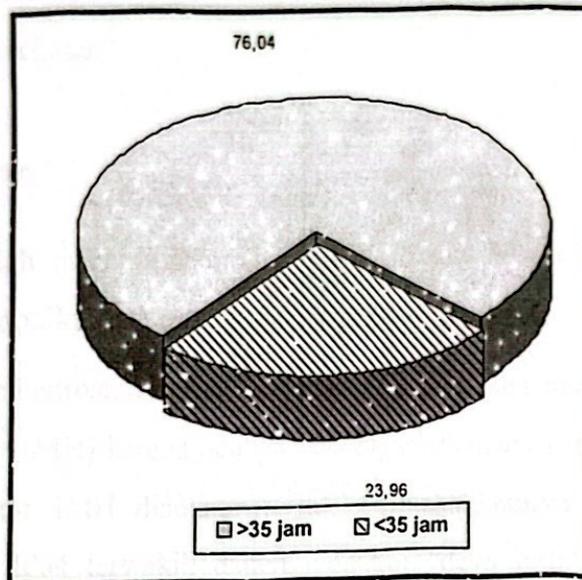
Tabel 5.5. Persentase Penduduk Yang Bekerja Menurut Jam Kerja Seluruhnya Tahun 2008

Jam Kerja Seminggu	Persentase
(1)	(2)
1. ≥ 35 jam	76,04
2. < 35 jam	23,96

Sumber: BPS Kabupaten Batang.

Dari tabel 5.5 diketahui bahwa di Kabupaten Batang setengah penganggurannya mencapai 23,96 % (jam kerja < 35 jam) dan sebagian besar yaitu 76,04 % yang bekerja penuh (≥ 35 jam). Untuk lebih jelasnya maka perhatikan gambar berikut ini.

Gambar 4. Persentase Penduduk Yang Bekerja Menurut Jam Kerja Seluruhnya Tahun 2008



BAB VI PENUTUP

Nilai IPM di Kabupaten Batang pada tahun 2008 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan terjadi peningkatan pada beberapa indikator kesejahteraan masyarakat seperti membaiknya kondisi perekonomian (naiknya pendapatan perkapita) dan membaiknya kondisi kesehatan dengan didukung oleh sarana dan prasarana kesehatan.

4.1. Kesimpulan

Setelah mencermati uraian dan hasil yang disajikan dalam studi ini maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut :

1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan penyempurnaan Indeks Mutu Hidup (IMH) karena adanya beberapa kelemahan indikator IMH. Kelemahan indikator IMH diantaranya tidak dimasukkannya indikator ekonomi yang dalam IPM terwakili dalam indikator "daya beli" atau "Purchasing Power Parity" yang disingkat "PPP".
2. Bahwa IPM hanya merupakan alat bantu untuk mendeteksi kelemahan apa yang masih perlu ditingkatkan penanganannya berkaitan dengan rencana pembangunan daerah.
3. Dalam mengatur strategi pembuatan perencanaan pembangunan perlu memperhatikan besarnya nilai setiap indikator sehingga angka-angka yang dihasilkan perlu ditingkatkan atau dipertahankan dengan berbagai usaha.
4. Sektor pendidikan sangat diperlukan untuk membuka peluang penduduk untuk mendapatkan penghasilan lebih baik, cerdas, dan terampil dalam usaha, yang kesemuanya sangat tergantung pada kepandaian membaca dan menulis (melek huruf) dan tingginya tingkat pendidikan. Untuk tahun 2008 yang perlu mendapat perhatian lebih yaitu antara lain tingkat pendidikan yang ditamatkan sebagian besar yaitu 38,11 % hanya pada tingkat pendidikan tidak/belum sekolah dan tidak/belum tamat SD dan tingkat pendidikan

tamat SD 32,58 %. Jumlah penduduk yang tidak bisa membaca dan menulis untuk tahun 2008 mencapai 13,22 %.

5. Dimasukkannya indikator kesehatan pada penyusunan IPM adalah untuk melihat faktor-faktor yang mendukung terciptanya angka harapan hidup yang tinggi. Semakin tinggi angka harapan hidup menunjukkan semakin maju suatu daerah/negara tersebut. Di Kabupaten Batang persentase keluhan kesehatan mencapai 27,58 % pada tahun 2008, dengan keluhan terbesar pada penyakit pilek (25,88 %), batuk (24,08 %), lainnya (14,96 %), dan panas (11,83 %). Indikator kesehatan bayi dan balita dilihat dari persentase penolong kelahiran oleh tenaga medis. Penolong kelahiran oleh tenaga medis (dokter, bidan) hanya mencapai 87,29 %. Sedangkan fasilitas kesehatan dilihat dari kondisi perumahan, diantaranya indikator status bangunan dan luas bangunan tempat tinggal, sumber air minum, jarak kepenampungan dan fasilitas tempat buang air besar.
6. Salah satu penunjang daya beli masyarakat yaitu pendapatan rumah tangga yang diterima dari hasil upah/gaji atau keuntungan usaha. Pada tahun 2008 angkatan kerja yang bekerja sebesar 92,79 %. Sedangkan yang berstatus pencari kerja mencapai 7,21 %. Dilihat dari jam kerjanya, penduduk yang bekerja penuh (≥ 35 jam seminggu) sebesar 76,04 % dan sisanya yang mencapai 23,96 % merupakan setengah pengangguran (< 35 jam seminggu).

4.2. Saran

Dari hasil penghitungan IPM Kabupaten Batang seperti yang telah disajikan di atas diharapkan akan dapat digunakan sebagai acuan dalam perencanaan pembangunan, khususnya yang berkaitan dengan kualitas sumber daya manusia.

1. Perlu ditingkatkan kesadaran masyarakat dengan meningkatkan persentase penolong kelahiran anak berumur 0-1 tahun yang ditolong tenaga medis, pemberian imunisasi lengkap dan peningkatan kesadaran penduduk untuk berobat ke pengobatan medis. Serta perbaikan kualitas perumahan dan

lingkungan pemukiman sehingga memenuhi syarat-syarat kesehatan dan estetika yang akan memberikan suasana nyaman bagi penghuninya.

2. Tingkat pendidikan masyarakat harus diperbaiki mengingat indikator pendidikan yang dianggap sangat penting untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia masih cukup rendah. Sebagian besar penduduk baru berpendidikan sekolah dasar, oleh karena itu program pendidikan tingkat lanjutan perlu digerakkan dan diperluas.
3. Daya beli masyarakat Kabupaten Batang sebenarnya sudah cukup tinggi tetapi masih perlu peningkatan dengan cara menciptakan kesempatan kerja yang lebih luas, menjaga agar pendapatan petani cukup tinggi karena sebagian besar penduduk kabupaten Batang bermata pencaharian dari bidang pertanian.